



# LAPORAN

## PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 9 TAHUN 2021

*Jl D. I Panjaitan No. 72 B  
Pangururan - Samosir*

*0626-20148*



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

### Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

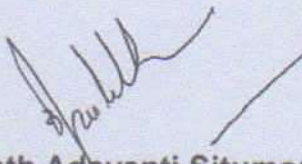
Pangururan, 22 April 2022

PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9

Menyetujui



**Sugianto, ST**  
Komisaris Utama



**Elizabeth Adeventi Situmorang**  
Direktur Utama

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara, Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir, Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele, Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir

# **BAB I**

## **PENJELASAN UMUM**

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SE OJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure (Struktur Tata Kelola), Governance Process (proses dari pelaksanaan Tata Kelola) dan Governance Outcome (hasil dari pelaksanaan Tata Kelola) pada 9 (Sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Elizabeth Adeventi Situmorang
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat dibidang kepegawaian kepada pegawai</p>		
2.	Nama	:	Herbet Karnelius Tambunan
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lain</p>		

<p>c. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
<p>a. Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap debitur restruktur dampak penyebaran COVID-19</p> <p>b. Action plan kredit bermasalah telah dibuat dan penagihan kredit bermasalah telah dimaksimalkan</p> <p>c. Sumber dana BPR tetap dipertahankan dengan peningkatan dana murah berupa tabungan sehingga dapat menurunkan biaya dana</p> <p>d. Pencairan kredit tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian</p> <p>e. Efisiensi biaya telah dilakukan</p> <p>f. Direksi aktif melaksanakan Program APU dan PPT, memantau pelaksanaan CDD dan EDD serta pemantauan pengkinian data nasabah</p> <p>g. Temuan Audit Internal terkait penginputan transaksi dan pengisian laporan sesuai panduan telah ditindaklanjuti</p> <p>h. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu penyampaian</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Sugianto, ST
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>c. Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan</p>		

	proses pekerjaan d.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya		
2.	Nama	:	Jona Sitepu, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a.Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi b.Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi c.Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan d.Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	a.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap debitur restruktur dampak penyebaran COVID-19 b.Membuat action plan dan memaksimalkan penagihan kredit bermasalah c.Untuk sumber dana BPR agar dipertahankan dengan peningkatan dana murah berupa tabungan yang dapat menurunkan biaya dana di BPR d.Pencairan kredit tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian e.Melakukan efisiensi biaya f.Terkait dengan penerapan APU PPT agar Direksi dan seluruh petugas yang terkait terus aktif melaksanakan Program APU dan PPT dengan melakukan pelaksanaan CDD dan EDD g.Menindaklanjuti temuan Audit Internal terkait penginputan transaksi dan pengisian laporan agar sesuai panduan h.Komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar ditindaklanjuti dan diperiksa kembali supaya tidak ada yang terlewatkan		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		
	Nihil		

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Komite dibentuk oleh BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80 miliar	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
2.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
3.			(Komite Audit)	
			(Komite Pemantau Resiko)	
			(Komite Remunerasi)	
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Komite dibentuk oleh BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80 miliar	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-

	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
<b>3.</b>	<b>Komite Remunerasi dan Nominasi</b>		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Komite dibentuk oleh BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80 miliar			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	Rp7.123.000,00	1.14%
2.	Herbet Karnelius Tambunan	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Ibu Elizabeth memiliki persentasi kepemilikan saham 1,14%			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	-	-	0%
2.	Herbet Karnelius Tambunan	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada Perusahaan lain				

**C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Herbet Karnelius Tambunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Elizabeth Adeventi Situmorang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Herbet Karnelius Tambunan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR tidak ada				

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sugianto, ST	Rp7.000.000,00	1.12%
2.	Jona Sitepu, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Bapak Sugianto, ST memiliki persentasi kepemilikan saham 1,12%			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Jona Sitepu, SE	601963	PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 1	0.54%
2.	Jona Sitepu, SE	-	PT Nusantara Bona Pasogit	0.05%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Bapak Sugianto, ST (Komisaris Utama) tidak memiliki saham pada Perusahaan lain.				

**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sugianto, ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jona Sitepu, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Sugianto, ST	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Jona Sitepu, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada				

**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp449.658.000,00	2	Rp255.540.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp135.590.000,00	2	Rp118.190.000,00
3.	Tantiem	1	Rp6.176.201,00	1	Rp2.808.977,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp33.331.667,00	2	Rp57.764.000,00
Total			Rp624.755.868,00		Rp434.302.977,00

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Direksi menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan dan Inhealth (2)	Dewan Komisaris menerima fasilitas asuransi kesehatan Inhealth (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Direksi menerima fasilitas Dana Pensiun DPLK Capital Life dan BPJS Ketenagakerjaan (2)	Dewan Komisaris menerima fasilitas Dana Pensiun DPLK Capital Life dan BPJS Ketenagakerjaan (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris Ditetapkan berdasarkan RUPS			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.54 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.15 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
NIHIL	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 Februari 2021	2	1. Monitoring Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2021 2. Penunjukan KAP untuk Tahun Buku 2020 3. Penyelesaian Kredit Bermasalah 4. Lain-lain
2.	27 Mei 2021	2	1. Monitoring Evaluasi Kinerja Bulan April 2021 2. Pelaksanaan APU dan PPT 3. Perkembangan Persiapan Panitia Pundi 4. Lain-lain

3.	15 September 2021	2	1.Evaluasi Kinerja Pencapaian Agustus 2021 2.Pemeriksaan Audit Internal 3.Pelaksanaan APU dan PPT 4.Laporan Pelaksanaan Gebyar Tabungan PUNDI 5.Kredit Relaksasi COVID-19 6.Persiapan Pemeriksaan OJK 7.Lain-lain
4.	12 November 2021	2	1.Evaluasi Kinerja Pencapaian Oktober 2021 2.Pembahasan RBB 2022 3.Pembahasan APU PPT dan Penerapan Tata Kelola 4.Lain-lain
5.	07 Desember 2021	2	1.Evaluasi Kinerja Pencapaian November 2021 2.Kredit Relaksasi COVID-19 3.Rencana Bisnis BPR 2022 4.Pelaksanaan Gebyar Tabungan PUNDI 5.Lain-lain
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 kali dalam setahun dan hasil rapat dituangkan dalam notulen			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Sugianto, ST	5	0	100%
2.	Jona Sitepu, SE	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat adalah 100%				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak Ada Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pegawai Bank								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak Ada Permasalahan Hukum secara Perdata atau Pidana yang dihadapi oleh PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 selama tahun 2021		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak Terdapat Transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
---

Tidak Terdapat Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
--



# BPR NBP 9

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 9

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9
Alamat	: Jln D.I Panjaitan No.72 B Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara
Nomor Telepon	: 0626 - 20148
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp 5.774.265.326,-
Total Aset	: Rp 25.336.317.160,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.1 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut

---

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara; Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir; Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele, Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.05	0.21
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.11	0.167
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.29	0.129
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.13	0.113
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.22	0.122
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan NonKeuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.1
Predikat Komposit			Sangat Baik

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara; Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir; Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele, Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.05)

Jumlah anggota Direksi BPR NBP 9 berjumlah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Lokasi Kabupaten Kantor Pusat yakni Kabupaten Samosir. Direksi memenuhi persyaratan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK dan diangkat berdasarkan RUPS.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.11)

Dewan Komisaris BPR NBP 9 berjumlah 2 (dua) orang dan seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat yaitu Provinsi Sumatera Utara. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

---

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara; Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir; Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele, Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR NBP 9 tidak menerapkan Komite karena Komite dibentuk oleh BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80 miliar

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)

BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan dan tidak pernah terjadi benturan kepentingan selama periode laporan

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.29)

- BPR NBP 9 telah memiliki Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi
- Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.13)

Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal (OJK).

---

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara; Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir; Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele. Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir

## **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

BPR NBP 9 telah menunjuk Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

## **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.22)**

BPR menerapkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan laporan profil risiko telah disampaikan sesuai ketentuan OJK

## **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

BPR NBP 9 menjalankan kegiatan operasional dengan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar ketentuan BMPK

## **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Rencana Bisnis Bank telah disusun dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan

## **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR NBP 9 telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. Laporan Publikasi telah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan.

## C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor- faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi tahun 2021 pada peringkat 1.1 (Sangat Baik).

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan kesimpulan antara lain :

- a. Komposisi dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2021 telah sesuai dengan penerapan tata kelola BPR
- b. Terkait penanganan benturan kepentingan, PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 telah memiliki kebijakan dan prosedur benturan kepentingan dan tidak terdapat benturan kepentingan
- c. Bank telah menerapkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal dan perlu ditingkatkan untuk dapat memitigasi risiko yang dihadapi oleh BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.
- d. Tidak ada hal-hal yang negatif terkait dengan hasil tata kelola (NIHIL)

---

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara; Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir; Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele, Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir

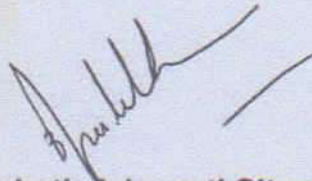
Pangururan, 22 April 2022

**PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9**

**Menyetujui**



**Sugianto, ST**  
Komisaris Utama



**Elizabeth Adeventi Situmorang**  
Direktur Utama

---

Kantor Pusat : Jl. D.I Panjaitan No. 72-B Kec. Pangururan Kab. Samosir, Sumatera Utara, Telp/Fax: 0626 20148  
Email : bpr\_nbp09@yahoo.com

Kantor Kas : 1. Jl. Raya Ambarita No. 16-A Ambarita Kec. Simanindo Kab. Samosir, Telp/Fax: 0625 451205  
2. Jl. Raya Dolok Sanggul - Sidikalang, Tele. Desa Partungko Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir